



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANALISIS PARTISIPASI MELENIAL (PEMILIH PEMULA) DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI DESA RIMBA BERINGIN KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI



ILHAM GUMA RASTI WIJAYA
NIM. 11675101425

PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : ILHAM GUMA RASTI WIJAYA
 NIM : 11675101425
 FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Ilmu Administrasi Negara
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PARTISIPASI MELENIAL
 (PEMILIH PEMULA) DALAM PEMILU
 LEGISLATIF TAHUN 2019 DI DESA RIMBA
 BERINGIN KECAMATAN TAPUNG HULU
 KABUPATEN KAMPAR

**DISETUJUI OLEH
 DOSEN PEMBIMBING**

Mashuri, MA
 NIP. 19770721 201411 1 002

MENGETAHUI

**DEKAN FAKULTAS
 Ekonomi dan Ilmu Sosial**



Dr. Drs. H. Muly. Said HM, M.Ag,MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

**KETUA JURUSAN
 Ilmu Administrasi Negara**

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: ILHAM GUMA RASTI WIJAYA

: 11675101425

: Ekonomi dan Ilmu Sosial/Ilmu Administrasi Negara

: ANALISIS PARTISIPASI MELENIAL (PEMILIH PEMULA)
DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI DESA
RIMBA BERINGIN KECAMATAN TAPUNG HULU
KABUPATEN KAMPAR

ARI/TANGGAL UJIAN : SELASA, 16 JUNI 2020

PANITIA PENGUJI
KETUA PENGUJI

Disetujui tgl. 25/06/2020

Fakhurrozi, SE, M.M

NIP. 19670725 200003 1 002

PENGUJI II

Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si

NIK. 130712074

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif K

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGUJI I

Afrizal, S.Sos., M.Si

NIP. 19650419 200701 1 025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ABSTRAK

ANALISIS PARTISIPASI MELENIAL (PEMILIH PEMULA) DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI DESA RIMBA BERINGIN KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR

Ooleh:

ILHAM GUMA RASTI WIJAYA
NIM. 11675101425

Skripsi ini menjelaskan mengenai partisipasi politik pemilih pemula dan pelaksanaan pemilihan Umum legislatif tahun 2019, adapun masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana partisipasimilenial dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Desa Rimba Beringin, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Apa Faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi partisipasi milenial dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Desa Rimba Beringin, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik dan yang mempengaruhi pemilih pemula dalam menentukan pilihan politiknya pada Pemilihan Umum legislatif tahun 2019 seperti faktor pendukung, faktor penghambat dalam pilihan politik pemilih pemula. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah, observasi, dokumentasi, wawancara dan kusioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik pemilih pemula adalah tinggi. Dari kedua model prilaku politik yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Model prilaku yang menjadi kecenderungan utama responden atau pemilih pemula adalah faktor pendukung. Pemilih pemula di Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dilihat dari indikator faktor pendukung dan faktor penghambat, kecenderungan jawaban responden sebagian besar pada kategori yang positif kabaikan karena kaum milenial yang berada di Desa Rimba Beringin tingkat kesadaran akan berpartisipasi baik diangka 70 persen pada pemilihan Legislatif tahun 2019. Faktor pendukung dari model prilaku politik pemilih pemula di Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar memiliki lima karakteristik yaitu adanya perangsang politik, krakteristik pribadi seseorang, kraktersitik sosial, situasi atau lingkungan politik dan pendidikan politik. Faktor penghambat memiliki tiga karakteristik yaitu kebijakan induk organisasi selalu berubah, pemula yang otonom dan kurangnya dukungan dari induk organisasi untuk menyuksekkan.

Kata kunci: Partisipasi, Pemilih Pemula, dan Pemilu Legislatif

1. Diararng mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, dan jalan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PARTISIPASI MELENIAL (PEMILIH PEMULA) DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI DESA RIMBA BERINGIN KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR”**.

Dalam masa penulisan skripsi ini penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian terimakasih banyak untuk adik tercinta Norisa Septia yang telah memberikan dukungan serta perhatian kepada peneliti.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag. M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM. M.Ag. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Mashuri, MA, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan nasehat, saran dan ilmu kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si. selaku ketua jurusan Administrasi Negara dan Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M. Kp selaku Sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Muslim, S.Sos., M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada peneliti.
7. Bapak Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepada Staff dan Pegawai Kantor Desa Rimba Beringin Ibuk Eti Hardiani Bapak Ratno, Bapak Kasi Pemerintahan M. Tri Nuryanto yang telah banyak membantu penulis.
9. Sahabat-sahabat, kakak tercinta Arif Kurnai Rahman, Fikri Hamdi, Riki Prayoga, Muhd. Zainal Asikin, Zaiunul Amirm, Amirul HSB, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik bagi peneliti yang selalau memberikan dukungan, semangat dan motivasi, serta doa hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Teman-teman seperjuangan Skripsi Apriawan, Vini, untuk teman-teman kelas Administrasi Negara A angkatan 2016, serta teman-teman KKN Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dayun 2019 yang telah memberikan semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti umunya kepada pembaca.

Pekanbaru, April 2020
Penulis

Ilham Guma Rasti Wijaya
NIM. 11675101425

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Konsep Partisipasi	12
2.2 Konsep Politik.....	14
2.3 Konsep Demokrasi	15
2.4 Partisipasi Politik.....	17
2.5 Pemilihan Umum (Pemilu).....	24
2.6 UU No. 7 Tahun 2017	34
2.7 Kampanye Pemilihan Umum	35
2.8 Pemilih Pemula Milenial	36
2.9 Masyarakat	38
2.10 Pandangan Islam Mengenai Pemilu	40
2.11. Penelitian Terdahulu	41
2.12. Kerangka Pikir.....	43
2.13. Indikator Penelitian.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
3.2 Jenis dan Sumber Data	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Populasi dan Sampel	47
3.4 Informasi Penelitian	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data	48
3.6 Analisa Data	50

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Rimba Beringin	52
4.2 Letak Geografis	53
4.3 Keadaan Demografis Desa Rimba Beringin	54
4.4 Mata Pencarian	55
4.5 Pendidikan	56
4.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rimba Beringin	57

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden	61
5.2 Partisipasi Milenial (Pemilih Pemula) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	63
5.3 Hambatan Partisipasi Milenial (Pemilih Pemula) Dalam Pemilu Legislatif Di Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	81

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	83
6.2 Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Partisipaisai Pemilih pada Pemilu Tahun 2019 di Desa Rimba Beringin.....	3
Tabel 4.1 Orbitasi Waktu Tempuh.....	53
Tabel 4.2 Klasifikasi Jumlah Penduduk Desa Rimba Beringin Menurut Jenis Kelamin	54
Tabel 4.3. Mata Pencarian penduduk Desa Rimba Beringin	55
Tabel 4.4. Jenis Sarana Pendidikan di Desa Rimba Beringin.....	56
Tabel 5.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	61
Tabel 5.2 responden penelitian menurut kelompok umur.....	62
Tabel 5.3 Responden Penelitian Menurut Jenis Pekerjaan	63
Tabel 5.4 Skala Interval Penelitian	64
Tabel 5.5 Tanggapan Responden Mengenai Partisipasi Milenial Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Indikator Perangsang Politik.....	65
Tabel 5.6 Tanggapan Responden Mengenai Partisipasi Milenial Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Indikator Karakteristik Pribadi.	67
Tabel 5.7 Tanggapan Responden Mengenai Partisipasi Milenial Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Indikator Karakteristik Sosial.	68
Tabel 5.8 Tanggapan Responden Mengenai Partisipasi Milenial Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Indikator Situasi Atau Lingkungan Politik.	71
Tabel 5.9 Tanggapan Responden Mengenai Partisipasi Milenial Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Indikator pendidikan politik	73



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.10	Tanggapan Responden Mengenai Partsipasi Milenial Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Indikator Kebijakan Induk Organisasi Selalu Berubah	75
Tabel 5.11	Tanggapan Responden Mengenai Partsipasi Milenial Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Indikator Pemula Yang Otonom.	77
Tabel 5.12	Tanggapan Responden Mengenai Partsipasi Milenial Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Indikator dukungan kurang dari induk organisasi untuk mensukseskan.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1 Kerangka Pemikiran.....	42
--------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah.

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan disebagian besar Negara didunia termasuk Indonesia, yang notabene memiliki masyarakat yang heterogen. Melalui pemilu memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan dicita citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Diantara pemilu tahun 1999 yang berbersifat multipartai, dimana dibukanya kembali kesempatan untuk bergeraknya partai politik secara bebas termasuk mendirikan partai baru, Miriam Budiardjo (2010:483). Ketika Pemilihan umum tahun 2004 mendatang merupakan langka awal terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan berekspresi dan berkehendak, dan mendapatkan akses terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga Negara.

Masyarakat (warga Negara) adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksana pemilu. Karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilihan masyarakat yang bisa menentukan nasib Negara dan bangsa kedepan. Setiap warga Negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan darah. Mereka memiliki hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat Negara. Hak ini disebut hak politik yang luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum.

Masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih, tidak hanya itu partisipasi politik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai control masyarakat terhadap suatu pemerintahan kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: "kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang undang.

Partisipasi politik rakyat tentu tak lepas dari kondisi atau system politik yang sedang berproses. Sistem kepolitikan bangsa Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari orde baru sampai pada reformasi. Disadar bahwa reformasi sering dimaknai sebagai era yang lebih demokratis. Sebagai proses dari transformasi politik, makna pilkada atau pilpres selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme check and balances di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, masyarakat mengharapkan pula agar pilpres dapat menghasilkan kepala Negara yang akuntabel, berkualitas, legitimate, dan peka terhadap kepentingan masyarakat.

Kesadaran politik warga negara menjadi factor determinan dalam partisipasi politik di dalam masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam partisipasi politik. Pengalaman pemilihan umum yang berlangsung

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

dalam beberapa decade menunjukkan banyaknya para pemilih yang tidak memberikan suaranya, sebagai fenomena penggambaran diatas apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis.

Sastroatmodjo (1995:67) menyatakan Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dalam kerangka demokrasi pancasila. Dimana untuk mewujudkan pola kehidupan sistem kedaulatan rakyat yang demokratis tersebut adalah melalui pemilihan umum, dengan pemilihan umum tersebut, rakyat Indonesia ingin turut serta secara aktif untuk berpartisipasi dalam memilih wakil mereka dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah partisipasi politik merupakan aspek penting tatanan Negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik.

Tabel 1.1 Data Partisipisai Pemilih pada Pemilu Tahun 2019 di Desa Rimba Beringin

No TPS	DATA PEMILIH	DATA PEMILIH PEMULA	DPTb & DPK	MENGGU NAKAN HAK	SUAR A SAH	SUARA TIDAK SAH	GOLP UT
TPS 1	239	28	11	83%	77%	5.40%	17%
TPS 2	153	25	17	84%	82%	2.50%	16%
TPS 3	231	30	30	88%	85%	3%	12%
TPS 4	259	15	5	78%	72%	6%%	22%
TPS 5	233	20	10	84%	81%	3.40%	16%
TPS 6	285	35	12	82%	79%	3.50%	18%
TPS 7	175	25	9	96%	91%	5.10%	9%
TPS 8	220	30	2	86%	80%	6.00%	14%
TPS 9	228	40	28	77%	73%	4.00%	23%
TPS 10	201	28	20	81%	78%	2.50%	19%
TPS 11	218	26	20	76%	73%	3.20%	24%
TPS 12	201	27	11	88%	86%	3.00%	46%
TPS 13	200	24	15	95%	88%	7.50%	5%
TPS 14	212	30	20	80%	74%	6.00%	20%
TPS 15	205	34	24	87%	84%	3.40%	13%
JMLAH	3270	417	234	84%	80%	4%	18%

Sumber :KPPS Desa Rimba Beringin Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi undang-undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data yang dari KPPS desa Rimba Beringin, jumlah pemilih di desa rimba beringin tahun 2019 yang memiliki hak partisipasinya sebanyak 3270 orang yang tersebar di 15 TPS dari jumlah pemilih tersebut, pemilih pemula sebanyak 417 orang dari jumlah pemilih yang tersebar di 5 Dusun yang berada di desa rimba beringin jumlah pemilih pemula tersebut tentunya membawa dampak yang berpengaruh pada kemenangan seseorang kontestan atau calon, dan ada juga DPTb dan DPK sebanyak 234 orang.

Dalam undang-undang No 7 Tahun 2017 pasal 198 tentang hak memilih dalam pemilu yang disebutkan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama sekali untuk memilih dan telah berusia genap 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin dan mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum. Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka selalu dianggap tidak memiliki pengalaman memilih (voting) pada pemilu sebelumnya, namun. Ketidak pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik, namun mereka tetap melaksanakan hak pilihnya ditempat pemungutan suara. (UU Pemilu edisi terbaru).

Pemilu legislatif merupakan cara untuk menentukan pemimpin daerah yang kemudian diatur oleh undang-undang dengan demokratis. Landasan diadakan pemilu legislatif yang melalui PERPU No.1 Tahun 2014 tentang pemilukada yang mana sebelumnya sebab menjadi problematika dalam pesta demokrasi. Masalah yang terjadi pada masyarakat Rimba Beringin yaitu kecenderungan individu-individu dalam menentukan hak partisipasinya membuat tidak kompak dalam bermuayarah, pada umumnya masyarakat mementingkan kepentingan pribadi

dan pada kepentingan umum yang menyangkut kepentingan bersama.

Dengan itu maka kita mengetahui bahwa partisipasi politik itu merupakan suatu hal yang bersifat suka rela terhadap masyarakat yang aktif dalam perpolitikan. Disini dapat kita lihat bahwa masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan untuk ikut serta dalam menentukan keputusan yang menyangkut keputusan bersama (umum). Oleh karena itu didalam pengambilan keputusan diusahakannya kerjasama antara partai politik dan masyarakat untuk memberikan keputusan yang baik dalam perpolitikan bagi negaranya. Dalam memberikan pengetahuan mengenai politik, selain partai politik sekolah dan keluarga, maka peran partai politikkah yang harus lebih diutamakan dalam memeberikan pendidikan tersebut.

Generasi milenial yang dikenal dengan generasi jaman sekarang merupakan generasi yang kini banyak menjadi perhatian diberbagai bidang. Generasi ini lahir setelah generasi X dikisaran tahun 1981 hingga 2000 (Young et.al.2013) saat ini mereka berusia antara 18-37 tahun dan dianggap unik dibandingkan generasi sebelumnya. Generasi milenial hidup pada era informasi yang diperoleh secara terbuka dari internet, termasuk pilihan dipasar online. Pengalaman bersejarah yang unik dari para milenial ini telah membentuk mereka memiliki hubungan dengan politik dan komunitas mereka.

Milenial juga sering dianggap sebagai generasi yang paling tidak peduli dengan persoalan politik,data dari EACEA (2012) menyebutkan generasi ini relatif sangat sedikit yang mau bergabung dalam partai politik.mereka juga cenderung memilih menjadi warga negara yang tidak ikut menggunakan hak pilih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka dalam pemilu. Ada banyak cara yang dapat dilakukan disetiap warga negara untuk berpartisipasi dalam bidang politik. menurut Teorell,et al, 2007 partisipasi politik warga diantaranya dengan memeberikan suara dalam pemilu, partisipasi politik generasi sekarang jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, masa kini memiliki sifat yang cenderung lebih individual, spontan, berdasarkan isu tertentu dan kurang terkait dengan perbedaan sosial.

Generasi milenial memiliki potensi yang besar bagi kekuatan politik karena jumlahnya yang banyak, namun seperti yang dikemukakan sebelumnya generasi ini kurang tertarik terlibat partisipasi dalam politik secara konvensional karena berbagai alasan, karena itu mereka lebih memilih jalur yang lebih mudah untuk diakses untuk berpartisipasi Contoh Penelitian tentang partisipasi politik telah menjadi tema yang menarik dalam penelitian ini.

Perilaku pemilih pemula memiliki karakteristik yang biasanya masih labil dan apatis, pengetahuan politiknya kurang, cenderung mengikuti kelompok sepuasnya dan mereka baru belajar politik khususnya dalam pemilihan umum, ruang ruang dimana mereka belajar politik biasanya tidak jauh dari ruang yang dianggap member rasa kenyamanan dalam diri mereka, adapun ruang-ruang tempat belajar politik diantaranya: pertama ruang keluarga, factor keluarga sangat mempengaruhi cara pandang mengenai seluk beluk politik yang mereka inginkan, kedua. Pengaruh teman sebaya, faktor ini sangat dipertimbangkan karena ini dominan dapat mengubah pola berpikir dalam berdemokrasi, yang ketiga pendekatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka hal yang menarik menjadi rumusan masalah untuk diteliti adalah bagaimana peran milenial dalam pemilu untuk terpilihnya pemimpin 2019..? tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar minat milenial dalam proses pemilu, sedangkan dalam Jurnal yang berjudul *Faktor-faktor Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kecamatan Andir Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jabar 2013*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari jurnal ini adalah pemilih pemula di Kecamatan Andir menyatakan memiliki faktor penghambat yang membuat mereka tidak dapat ikut berpartisipasi dalam Pilgub Jabar 2013, seperti factor kurangnya dukungan untuk mensukseskan yang mereka rasakai dan lingkungan sekitar mereka, kemudian induk organisasi dimana mereka menjadi bagiannya yang membuat mereka sulit untuk bisa berpartisipasi dalam Pilgub Jabar 2013, dan ada pula pemilih pemula yang otonom yang benar-benar enggan berpartisipasi pada Pilgub Jabar 2013 kemarin, Hasil penelitian 2019 tentang strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019, dimana hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi KPU meningkatkan partisipasi pemilih melalui :

1. Strategi Penguatan, upaya untuk meningkatkan partisipasi dengan melihat kualitas KPU. yaitu meningkatkan koordinasi antar anggota KPU baik tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggara pemilu, memperkuat komunikasi dan keterbukaan KPU kepada publik serta memberikan jaminan ketersediaan sejurnlah data yang akurat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Strategi Rasionalisasi, upaya yang dilakukan adalah dengan membuat selebaran kertas yang berisikan nama-nama calon legislatif baik Provinsi atau Kabupaten, selain itu memberikan informasi melalui media suara (radio), gambar atau baliho.
3. Strategi Bujukan, melakukan program jalan sehat, sepeda gowes. KPU goes to campus serta dialog pemilu secara langsung kepada masyarakat.
4. Strategi Konfrontasi, berupa sosialisasi cara memilih dan kerugian jika tidak memilih, maka pihak KPU mengajak masyarakat untuk incmilili, karena jika tidak memilih, maka akan hilang hak politiknya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dilampirkan bahwa banyak penyebab yang membuat masyarakat atau milenial (pemilih pemula) untuk tidak berpartisipasi atau berpartisipasi dalam pemilihan umum, seperti popularitasnya calon yang membuat milenial berpartisipasi politik, gencarnya pemberitaan tentang paslon baik kondisi sosial politik yang menunjukkan hubungan negatif terhadap partisipasi politik pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan secara langsung dan transparan merupakan jawaban atas aspirasi rakyat, berdasarkan realitas diatas maka penulis merasa tertarik untuk menganalisis fenomena politik di Desa Rimba Beringin.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana partisipasi milenial dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Desa Rimba Beringin, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa Faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi partisipasi milenial dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Desa Rimba Beringin, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.?

3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi milenial di Desa Rimba Beringin, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar dalam pemilu legislatif tahun 2019.
2. Ingin mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi partisipasi milenial dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Desa Rimba Beringin, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini digunakan untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan oleh penulis dengan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dapat memperluas dan memperkaya wawasan ilmiah, khususnya dalam Ilmu Pemerintahan, khususnya berkaitan dengan partisipasi milenial dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Desa Rimba Beringin, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan sampel banyaknya partisipasi milenial dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilu legislatif tahun 2019 di Desa Rimba Beringin, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

3. Secara Akademis

Secara akademis penelitian ini sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi waktu yang akan datang sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman

4. Bagi Peneliti

Manfaat yang didapat bagi peneliti adalah mendapatkan wawasan dan dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari diperkuliahan.

1.5 Sistematis Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan yang mana terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, balasan penelitian dari sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Terdiri dari konsep-konsep yang melandasi dari penelitian sehingga dapat mendukung dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel serta metode analisis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan lokasi penelitian, penelitian mencoba menggambarkan secara umum tentang lokasi penelitian, susunan dan organisasi lokasi, uraian bagian dan bagian lokasi penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang diteliti,

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari peneliti dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca



UIN SUSKA RIAU



BAB II

LANDASAN TEORI

1. Konsep Partisipasi

Secara etimologi, konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari bahasa Inggris, yaitu kata “part” yang berarti bagian. Jika kata “part” dikembangkan akan menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi “to participate” yang bermakna turut ambil bagian.

Kehidupan pertumbuhan partisipasi memerlukan tata nilai yang operasional (dimanifestasikan dalam bentuk perilaku yang nyata) yang menerima dan menghargai persamaan, keterbukaan, perdebatan pendapat, dan berpikir memertanyakan (critical thinking). Penekanan Abdul Aziz Saleh terhadap penghargaan pada nilai-nilai persamaan, keterbukaan, perbedaan pendapat dan berpikir memertanyakan, berarti konsep partisipasi tidak mengandung nilai kebebasan, tanpa ada paksaan. Jika nilai yang disebut terakhir ada, berarti hal tersebut tidak mencakup sebagai konsep partisipasi.

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (Inu Kencana Syafie, 2005:114)

Keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat, dimana masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan pemimpin pemerintah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik ditingkat pusat sampai pada tingkat daerah. Menurut saligman Edwin dan MAI amin, dalam jurnalnya (2003:9) partisipasi yaitu ikut serta nya sesuatu kesatuan untuk mengambil dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih besar.

Berdasarkan pendapat yang diatas maka partisipasi merupakan faktor terpenting dalam setiap sikap yang dilakukan oleh seseorang atau individu baik dalam suatu organisai, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang tersebut mencapai tujuan yang akan dicapai oleh organisasinya dan mempunyai tanggung jawab bersama setiap tujuan tersebut. Partisipasi merupakan setiap proses identifikasi atau menjadi peserta, suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu. Partisipasi itu terdiri dari beberapa jenis diantara partisipasi sosial dan politik, partisipasi sosial merupakan derajat partisipasi individu dalam kehidupan sosial. Sementara itu, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi-pribadi danm dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama, terorganisir dan spontanitas, terus menerus atau seporadik, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif maupun tidak efektif. Yang mana dari definisi tersebut hungton (Miriam budiardjo 2008:368) menyimpulkan suatu kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah mencakup kegiatan rill bukan pernyataan sikap selanjutnya, partisipasi politik dilakukan oleh khalayak politik yang bukan politikus atau bukan politik dari pengikutnya.

Mengingat betapa pentingnya arti partisipasi dalam berbagai kebijakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maupun keputusan yang akan ditetapkan ataupun yang akan diambil, demi untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya maka peranan atau partisipasi masyarakat tidak dapat ditinggalkan begitu saja apabila dipandang sebelah mata, dari beberapa pendapat diatas yang mengungkapkan definisi partisipasi, dapat dipahami bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam pemilihan dan pengambilan keputusan kemudian terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

2.2 Konsep Politik

Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis dan teta arti dari kata polis sendiri yaitu kota/Negara sedangkan untuk kata teta yaitu urusan. Adapun menurut Miriam Budiardjo, pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Menurut Kartini Kartono, dilihat dari struktur dan kelembagaan politik dapat diartikan sebagai suatu yang ada relasinya dengan pemerintahan, undang-undang, hukum, kebijakan, atau policy, dan lain-lain yakni:

1. Pengaturan dan penguasaan oleh Negara
2. Cara memerintah suatu teritorium tertentu
3. Organisasi, pengaturan dan tindakan Negara atau pemerintahan untuk mengendalikan Negara secara konstitusional dan yuridis formal
4. Ilmu pengetahuan tentang kekuasaan. (Beddy Irawan maksud 2012:12)

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Konsep Demokrasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu secara garis besar definisi atau makna dari politik ini adalah sebuah perilaku atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan dalam tatanan Negara dapat merealisasikan cita-cita Negara sesungguhnya, sehingga mampu membangun dan membentuk Negara yang mampu memberikan kebahagiaan bersama didalam masyarakat tersebut.

Demokrasi adalah bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut. Untuk mengetahui arti demokrasi, dapat dilihat dari dua tinjauan, yakni tinjauan bahasa (etimologi) dan tinjauan istilah (terminology). Secara etimologi “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos (demokratis) adalah keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Menurut Miriam Budiardjo (2008:108), istilah demokrasi berasal dari kata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Dalam kata lain demokrasi adalah pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kemudian ia membagi demokrasi dalam dua model yaitu demokrasi langsung (direct democracy) merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik melalui wakil yang ditunjuk oleh rakyat. Esensi demokrasi adalah proses penyelesaian nya sesuatu yang ideal, karena itu tidak pernah tercapai secara penuh, demokrasi mengandung aspek-aspek pemerataan politik, kebebasan publisiti, representasi dan ketetapan hati yang diterima secara luas.

Suatu pemerintah yang demokratis menurut definisi ranney memiliki 4 prinsip dasar yakni:

1. Kedaulatan
2. Persamaan politik
3. Konsultasi
4. Pengaturan oleh mayoritas

Gagasan pokok atau gagasan utama suatu pemerintah demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia yaitu pada dasarnya manusia yang mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial.

Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi yaitu:

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintah misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung umum bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Dalam perkembangan demokrasi menjadi tantangan diterima atau dipakai oleh hampir seluruh Negara didunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut.

1. Adanya keterlibatan warga negara dalam pengambil keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Adanya pengakuan penghargaan dan perlindungan
3. Adanya persamaan hak bagi warga negara
4. Adanya lembaga pengadilan dan kehakiman
5. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat
6. Adanya pemilihan umum untuk memilih pemimpin
7. Adanya pengakuan terhadap perbedaan kelembagaan.

2.4 Partisipasi Politik

Partisipasi politik itu merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Negara Negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkatan partisipasi warga negara meningkat, modernisasi politik erat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah.

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(Sastroatmodjo, 1995:67).

partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang secara atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (publik policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya (Budihardjo 2008:367)

berbeda menurut Rahman (1998:128) bahwa partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama.

Partisipai politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan Negara-negara berkembang. Dalam Negara demokrasi, partisipai politik berperan penting dalam jalannya sebuah roda pemerintahan yang demokratis. Kegiatan ini seperti memberikan suara pada pemilihan umum atau kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi baik secara langsung atau tidak langsung dalam kancah politik.

2.1.1 Pengertian Partisipasi politik

berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti "mengambil bagian". Dalam bahasa Inggris, partisipasi atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004:102-103).

partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007: 151) adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Selanjutnya Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin (2007:150) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Ahli yang lain juga menyebutkan pengertian partisipasi politik:

1. Keith Fauls Keith Fauls (1999:133) memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (the active engagement) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun TILPE berlaku oposisi terhadap pemerintah.
2. Herbert McClosky dalam International Encyclopedia of the Social Sciences Herbert McClosky (1972: 252) memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

3. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* Huntington dan Nelson (1997: 3) partisipasi politik sebagai Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan,

2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik.

Partisipasi masyarakat dalam berpolitik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti (1992:140) menyebutkan dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang.

1. aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll.

2. Menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan variable independen).

Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (Ramlan Surbakti, 2006:144-145).

Selanjutnya menurut Myron Weimer partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dikutip oleh Mohtar Mas'ood dan Collin MacAndrews (2011:56-57)

1. Modernisasi

Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.

2. Terjadi perubahan struktur kelas sosial. Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industralisasi dan modernisasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern. Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.
4. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.
5. Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya
Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

2.4.3 Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik.

Paige dalam Cholisin (2007:153) merujuk pada tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah (sistem politik menjadi empat tipe yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatis), partisipasi militan radikal, dan partisipasi pasif.

Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan (apatis). Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Dan apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan nonkonvensional termasuk yang mungkin legal (petisi) maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentuk bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidak puasan warga negara. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond yang dikutip oleh Mohtar

Mas'oed (2011:57-58) yang terbagai dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional

1. Partisipasi politik konvensional yaitu:
 - a. Pemberian suara atau voting
 - b. Diskusi politik
 - c. Kegiatan kampanye
 - d. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
 - e. Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administrative
2. Partisipasi politik non konvensional yaitu:
 - a. Pengajuan petisi
 - b. Berdemonstrasi
 - c. Konfrontasi
 - d. Mogok
 - e. Tindak kekerasan politik terhadap harta benda : pengrusakan, pemboman, pembakaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.4.4 Landasan Partisipasi politik.

Huntington dan Nelson (1994:21) mengemukakan bahwa landasan yang lazim digunakan untuk menyelenggarakan partisipasi politik adalah:

1. Kelas : perorangan-perorangan dengan status sosial, pendapatan, pekerjaan yang serupa.
2. Kelompok/komunal : perorangan-perorangan dari ras, agaman, bahasa, atau etnisitas yang sama.
3. Lingkungan(neighborhood) : perorangan-perorangan yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain.
4. Partai : perorangan yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan control atas bidang bidang eksekutif dan legislative pemerintahan.
5. Golongan (fuction) : perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus atau intens satu sama lain. dan salah satu manifestasinya adalah pengelompokan patron klien, artinya satu golongan yang melibatkan paertukaran manfaat-manfaat secara timbale balek diantara perorangan-perorangan yang mempunyai sistem status, kekayaan dan pengaruhyang tidak sederajat.

2.5 Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum (Pemilu) berdasarkan UUDS 1945 Bab 1 Pasal 1 ayat(2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut undang-undang dasar, dalam demokrasi modern yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat maka dilaksanakan pemilihan umum

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik.

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu, sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran suatu hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat (Kusnardi, 1994:329)

2.1 Tujuan Pemilu.

Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (publik policy).
2. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjamin.

3. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2.5.2 Fungsi Pemilihan Umum.

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

1. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia,
2. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
3. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

2.5.3 Asas-Asas dalam Pemilihan Umum.

Asas adalah suatu pangkal tolak ukur pikiran untuk suatu kasus atau suatu jalan dan sarana untuk menciptakan hubungan atau kondisi yang kita hendaki. Asas pemilu berarti pangkal tolak pikiran untuk melaksanakan pemilu. Suatu pemilu yang demokratis dapat tercapai jika berjalannya asas-asas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang medasari pemilu tersebut. Pada dasarnya asas yang dipakai dalam pilkada atau pilpres asas langsung sama dengan asas dalam pemilu, khususnya pemilu 2004. Pemilu 2004 yang disebut KPU sebagai penyelenggara pemilu, 2004 banyak mengusung hal baru guna rekuitmen politik agar kualitas wakil rakyat semakin baik. (mohammadNajib dalam Suparman Marzuki, dkk, 2005:pengantar ix)

Asas pemilu langsung telah diatur dalam pasal 56 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004, yang menyebutkan "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil".Hal ini telah ditegaskan kembali dalam pasal 4 ayat (3) PP No.6 Tahun 2005. Prinsip-prinsip pilkada atau pilpres sama seperti prinsip umum pemilu yang di uraikan sebagai berikut:

1. Langsung Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa perantara.
2. Umum Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
3. Bebas Setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapu. Di dalam melaksanakan haknya,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap warga negara diajamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani.

Rahasia Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada suarat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

Jujur Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. **Adil** Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun (Hestu Cipto Handoyo, 2003:217-219) Penggunaan asas *luber dan jurdil* sebagai asas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara demokratis. Sehingga jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka hal tersebut merupakan pelanggaran dan harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4 Sistem Pemilihan Umum

dalam ilmu politik dikenal berbagai macam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

1. Single-member constituency (Sistem Distrik)

Sistem merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliput) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat.

2. Multi-member constituency (Sistem Perwakilan Berimbang)

Satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan proportional representation atau sistem ini dimaksud untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Gagasan pokok ialah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Untuk keperluan ini diperlukan suatu pertimbangan (rahman, 2007:152)

2.5.5 Penyelenggara Pemilihan Umum

Penyelenggaraan pemilihan umum adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, ada beberapa penyelenggara pemilu:

- A. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dalam melaksanakan pemilu. KPU sendiri berada ditingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
- B. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten /kota untuk melaksanakan pemilu ditingkat kecamatan atau nama lain.
- C. Panitia pemungutan suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilu ditingkat kelurahan/Desa atau nama lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.

2.6 Macam-Macam Pemilihan Umum

1. Pemilihan Umum legislatif

Pemilu legislatif adalah pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dikursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum(KPU) yang bersifat nasional, tetap, mandiri, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu dan waktu pemilihannya dilakukan secara serentak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah memilih presiden dan wakil presiden dalam Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar Negara Indonesia tahun 1945. Pemilu presiden dan wakil presiden ini melalui proses pemilihan secara langsung oleh rakyat. Adapun peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.3.7 Tata Cara Pemberian Suara Pada Pemilu Tahun 2019

dalam pemilihan umum masyarakat diberikan hak suara untuk memilih calon, maupun partai politik yang mereka nilai akan mampu memperjuangkan aspirasinya. Tata cara pemberian suara pada pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya tahun 2014, pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar dan nama calon anggota legislatif, pemilu 2019 pemilih cukup memberikan tanda satu kali pada surat suara.

Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 pada Bab X pasal 153 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa pemberian suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan memberikan tanda satu kali pada surat suara berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam perhitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu. Kemudian tata cara pemberian suara dipertegas lagi dalam peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2008 pasal 26 ayat (3) poin dijelaskan bahwa tata cara memilih wakil rakyat dengan cara member tanda (✓) centang atau sebutan lainnya menggunakan alat yang sudah disediakan oleh KPU, pemberian pada (✓) centang atau sebutan lainnya untuk memilih anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota dilakukan satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/ Kota, sedangkan cara untuk pemilihan anggota DPD yaitu dengan cara memberikan tanda (✓) centang atau sebutan lainnya pada salah satu foto calon anggota DPD. Jadi tatanan sistem yang berbeda itu, pemilu diharapkan akan berlangsung secara demokratis, jujur dan adil serta langsung, umum, bebas, rahasia

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.8 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam pemilu.

Menurut Milbrath dalam maran (2007:156) menyebutkan ada dua faktor utama yang mendorong orang dalam berpartisipasi politik, bahwa adanya faktor pendukung dan faktor penghambat, yang mana didalamnya faktor pendukung terdapat lima unsur diantaranya adanya perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, dan pendidikan politik. Dari dua faktor utama yang dikatakan milbrath, terdapat faktor penghambat juga yang mendorong orang untuk tidak berpartisipasi politik, unsur yang ada didalam faktor penghambat tersebut yaitu kebijakan induk yang selalu berubah. Pemula yang otonom, dan dukungan yang kurang dari induk organisasi untuk mensukseskan.

Lima faktor utama yang mendorong orang dalam berpartisipasi politik dalam pemilu yaitu:

1. sejauh mana orang menerima perangsang politik, karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik. Dalam hal ini minat berpartisipasi dipengaruhi misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi poliutik mellaui media masa atua diskusi formal maupun informal.
2. Faktor karakteristik pribadi seseorang. Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai keperdulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, biasanya mau terlihat dalam aktivitas politik.
3. Karakteristik sosial. Menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras,

etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap perilaku seseorang dalam bidang politik.

Oleh sebab itulah, mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik.

4. Situasi atau lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik.
5. Pendidikan politik. Ada pula yang menambahkan sebagai pendidikan politik sebagai warga negara merupakan faktor pendukung lainnya yang sifatnya internal bagi sesuatu kelompok yang melaksanakan partisipasi politiknya.

Selain faktor pendukung, milbarth juga menyebutkan 3 faktor yang dapat menjadi penghambat suatu partisipasi politik, adapun faktor penghambat dari partisipasi politik itu antara lain:

1. Kebijakan induk organisasi selalu berubah. Maksudnya disini organisasi atau badan yang dipandang elite politik dalam tubuh suatu organisasi masyarakat atau seseorang pemilih selalu merubah kebijaka terhadap partisipasi yang ada dengan yang baru sesuai situasi dan kondisi.
2. Pemilih pemula yang otonom. Pemilih pemula yang otonom akan membuat gerakan politisnya tidak indenpenden, pemilih pemula tersebut berada dalam hubungan suatu organisai induk.
3. Dukungan yang kurang dari induk untuk mensukseskan. Dukungan yang kurang selama proses partisipasi politik akan menghambat aktivitas politik pemilih pemula, komunikasi dengan induk organisasi harusterjalin baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan tetap harus diperhatikan.

6 UU No 7 Tahun 2017

Didalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan dalam pasal 570 bahwa UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum peraturan sebelumnya yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 7/2017 tentang pemilu :

1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 176, tambahan lembaran Negara republik Indonesia noimor 4924)
 2. Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2011 nomor 101, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5246) dan
 3. Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2012 Nomor 117, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5316)
- Penetapan UU No 7 Tahun 2017 sebagai undang-undang merupakan

penyederhanaan dan penggabungan dari tiga buah undang undang diatas, budaya partisipasi politik yang masih pasif membutuhkan kesadaran politik dari pemilih pemula agar mampu berpartisipasi aktif dan berupaya positif dalam upaya menjaga dan menyukseskan demokrasi. Dipihak lain, juga terdapat para pemilih pemula yang memutuskan tidak memberikan hak pilihnya dalam pemilu, penyebab persoalan ini adalah kurangnya pendidikan politik dan indoktrinasi politik oleh lembaga Negara ataupun partai politik, mayoritas pemilih pemula

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sitaras Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dikategorikan atas kaum intelektual, harus didorong untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam menggunakan hak pilih yang sesuai dengan hati nurani. Kesadaran politik dari pemilih pemula harus dibangun agar masa labil mereka tidak dijadikan sebagai target yang mudah dimobilisir.

7 Kampanye Pemilihan Umum

Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye yang diikuti oleh peserta kampanye. Keputusan komisi pemilihan umum (KPU) No. 35 Tahun 2004 tentang kampanye yang mengatur semua jenis kampanye, ada 9 jenis kampanye yaitu:

- A. Debat publik/ debat terbuka antara calon.
- B. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- C. Pemasangan alat peraga ditempat umum.
- D. Penyebaran bahan kampanye kepada umum.
- E. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik.
- F. Penyiaran melalui radio atau televise.
- G. Pertemuan terbatas.
- H. Rapat umum.
- I. Tatap muka dan dialog.

Tindak pidana politik uang dalam kampanye, sebelum membahas mengenai tindak pidana money politik penulis menjelaskan tentang money politik, money politik adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih



malupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum, pembelian bisa menggunakan uang atau barang, politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Pemaknaan praktik politik uang didapat dari pasal 73 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) dari undang-undang tersebut pula, praktik politik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan tindak pidana pemilihan, sehingga pelaku politik uang dapat diberikan dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.8 Pemilih Pemula (Milenial)

Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, pemilih yang rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia memilih. Menurut pasal 198 UU No 7 Tahun 2017 pemilih adalah mereka yang baru pertama sekali untuk memilih dan telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah menikah, sedangkan pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 Tahun 2018 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17(tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah menikah. (undang-undang pemilu edisi terbaru tahun 2017)

Komisi Pemilihan Umum RI (2019:17) mengemukakan pemilih pemula adalah mereka yang memasuki usia memilih dan yang akan menggunakan hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

milnya untuk pertama kali dalam pemilu. Dengan siklus pemilihan di Indonesia yang digelar setiap lima tahun sekali maka kisaran usia pemilih pemula adalah 17-21 tahun. Rata-rata kelompok pemilih ini adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan tinggi dan pekerja muda, atau dengan kata lain lulusan SMA atau yang masih duduk dibangku SMA. Pemilih pemula menjadi sasaran strategis karena berbagai alasan. Pertama, jumlah pemilih pemula dalam setiap pemilu cukup besar, kedua mereka adalah WNI yang baru pertama kalinya memberikan suara dalam pemilu sehingga perlu diberi arahan yang baik agar memiliki pemahaman yang baik pula terhadap demokrasi, ketiga mereka adalah calon pemimpin masa depan sehingga dengan menggali dan mengetahui pandangan mereka tentang demokrasi kita dapat memberikan apa yang mereka butuhkan sebagai bekal dimasa depan.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula (milennial) adalah warga negara yang daftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.

Kelompok pemilih pemula (milennial) ini biasanya mereka yang berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda, milennial dalam ritual demokrasi (pemilu legislative, pilpres) selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya tingkat yang optimal agar dapat berperan dalam bidang politik.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pemilih pemula

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.9 Masyarakat

yaitu:

1. Warga negara Indonesia dan pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah menikah.
2. Baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.
3. Mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019

Berbicara tentang masyarakat maka kita akan berbicara tentang kebudayaan suatu wilayah karena bagaimana pun sebuah komunitas manusia yang membentuk sebuah kelompok pasti akan berkreasi dari hasil interaksi antar individu yang menghasilkan sebuah kebudayaan.

Masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu musyarak yang artinya bersama-sama kemudian berubah menjadi kumpulan bersama, hidup bersama saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Menurut Robert M. Melver (dalam Miriam budiardjo, 2008:46) mengatakan “*masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata* (society means a system of ordered relations). Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan yang ditata.

Merujuk pada kamus besar Indonesia (KBI) Tahun 2008, Perkataan “masyarakat” diartikan sebagai sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu atau diartikan sebagai golongan orang-orang yang mempunyai kesamaan tertentu. Kemudian perkataan warga diartikan sebagai anggota (keluarga, perkumpulan, dan sebagainya) atau tingkatan sebagainya dalam masyarakat atau kasta sementara warga negara adalah warga

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan suatu Negara.

Pada situasi dimana manusia masih berpikir dan bertindak secara primitive maka dalam situasi seperti itu keadaan saling memerangi dan saling melukai menjadikan manusia dimasa lalu berpikir untuk menemukan keadaan sosial yang lebih baik. Thomas hobbes dan john locke (dalam rudi salam sinaga, 2012:11) berkeyakinan secara alamiyah akal budi setiap orang akan menuntut dan mengatur perilaku setiap orang. Membuat manusia berperilaku rasional dan tidak merugikan manusia lainnya.

Soerjono soekanto membagikan definisi terbentuknya sebuah masyarakat menjadi beberapa unsure yaitu:

1. Sebuah kelompok manusia yang disebut masyarakat, minimal beranggotakan dua orang.
2. Setiap anggota yang bersangkutan mempunyai kesadaran bahwa dia bagian dari satu kesatuan sebuah kelompok.
3. Mereka melakukan hubungan dalam waktu yang lama menghasilkan manusia baru dan membuat aturan aturan yang diberlakukan pada setiap individu dalam menjalin hubungan antara anggota masyarakat.
4. Mereka menciptakan hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta ketergantungan dan keterkaitan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya.

Sebuah komunitas masyarakat yang baik setidaknya mempunyai empat ciri utama yaitu:

1. Mempunyai sistem tindakan utama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

2. Mempunyai rasa setia pada sistem yang mereka sepakati bersama
3. Mampu bertahan hidup lama dalam menjalani hubungan dengan individu yang lainnya
4. Melakukan regenerasi dengan sesama anggotanya atau melakukan reproduksinya.

2.10 Pandangan Islam Mengenai Pemilu

Fatwah Al Lajnah Ad Daimah Yang ditanda-tangani oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz (ketua), Syaikh Abdurrazaq 'Afifi (wakil ketua) dan Syaikh Abdullah Ghuddayan anggota). Yaitu fatwa nomor 14676 yang terdapat dalam *Majmu' Fatawa Al Lajnah Ad Daimah* (27/372-374), Wajib bagi kaum Muslimin di negara yang tidak ber hukum dengan syari'at Islam untuk mengerahkan usahanya dan apapun yang mereka mampu untuk ber hukum dengan syariat Islam.

Dan (wajib pula bagi mereka) untuk bersatu padu mendukung partai yang diketahui partai tersebut akan ber hukum dengan syari'at Islam. Adapun mendukung pihak-pihak yang mengajak untuk tidak menerapkan syari'at Islam, maka ini tidak boleh. Bahkan bisa menyeret pelakunya kepada kekufuran, sebagaimana firman Allah Ta'ala

إِن إِلَيْكَ اللَّهُ أَنْزَلَ مَا بَعْضُ عَنِ يَفْتِنُوكَ أَنْ وَاحِدَهُمْ هُوَ أَهْمُ تَتَّبِعْ وَلَا اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بَيْنَهُمْ أَحْكَمُ وَنَ لَجَهْلِيَّةٍ أَفْحَكَمَ ۖ لَفَسِقُونَ النَّاسِ مِنْ كَثِيرٍ وَإِنْ ذُنُوبِهِمْ بِبَعْضٍ يُصِيبُهُمْ أَنَّ اللَّهَ يُرِيدُ أَنْ نَمُوتَ فَأَعْلَمَ تَوَلَّوْنَا ۖ يُوقِنُونَ لِقَوْمٍ حُكْمًا اللَّهُ مِنْ أَحْسَنُ وَمَنْ يَبْغُونَ

Artinya: "Hendaklah Engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut hukum yang diturunkan Allah, janganlah Engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memperdaya Engkau dalam sebagian hukum yang telah diturunkan Allah kepadamu. Lalu jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan?! Tidak ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini" (QS. Al-Ma'idah 49-50)

11 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Metode	Kesimpulan
1	Tarigan	2008	Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung Dalam Pelaksanaan WHIT Pilkada Tahun 2008	metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam pilkada pada penelitian ini adalah popularitas calon dan kondisi sosial politik. Sedangkan hubungan yang positif berdasarkan analisis regresi hanya pada popularitas calon, sedangkan status sosial ekonomi dan kondisi sosial politik menunjukkan hubungan yang negative terhadap partisipasi politik.
2	Mudjiyanto	2012	literasi internet dan partisipasi politik masyarakat pemilih dalam aktivitas pemanfaatan media baru menjelaskan	Metode kualitatif	secara over all responden umumnya merupakan para pengguna internet yang tipologi partisipasi politiknya itu sudah bertipologi spectator. Sementara partisipasi politik yang bertipologi gladiator hampir tidak ada dan bahkan tidak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			bahwa menyangkut tipologi partisipasi politik		satupun responden yang bertipologi politik pengkritik
	Morrisan	2016	tingkat partisipasi politik dan sosial generasi muda pengguna media sosial	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 73,2 persen responden memberikan suara pada pemilu legislatif 2014 dan sebagian besar 80 persen menunjukkan keinginan besar untuk memberikan suara pada pemilu presiden 2014. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik dikalangan pemilih pemula adalah tinggi, selain itu, bentuk partisipasi politik sebagian besar responden barulah pada level yang paling ringan konsekuensinya yaitu sekedar membicarakan isu politik dengan teman atau rekan sejawat, bentuk kampanye lain untuk pemilih pemula seperti mempromosikan kandidat/ parpol, membantu kampanye parpol atau memberikan sumbangan keparpol adalah relatif rendah atau tidak intensif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

2.12. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran penelitian adalah batas-batas yang akan diteliti untuk menghindari permasalahannya tidak terlalu kompleks sehingga hasil penelitian menjadi jelas dan terarah, dan tidak menyimpang dari jalur pembahasan. Hasil penelitian Timan dan purwat (1987) mengemukakan kerangka pemikiran adalah konsep yang terdiri dari hubungan antara sebab akibat atau disebut juga kausal hipotesis antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas dalam rangka memberikan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diselidiki.

Pilihan masyarakat untuk golput juga diterangi disebabkan beberapa faktor, salah satunya faktor teknis ada sebuah paradigma masyarakat bahwa jika ada pasangan calon yang memberikan uang kepada calon pemilih, dia akan memilih jika tidak ada pasangan calon yang tidak memberi uang, dia akan golput.

Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut: penelitian ini berusaha melihat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam partisipasi pemilih pemula (milenial) ketika pemilu di Desa Rimba Beringin, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

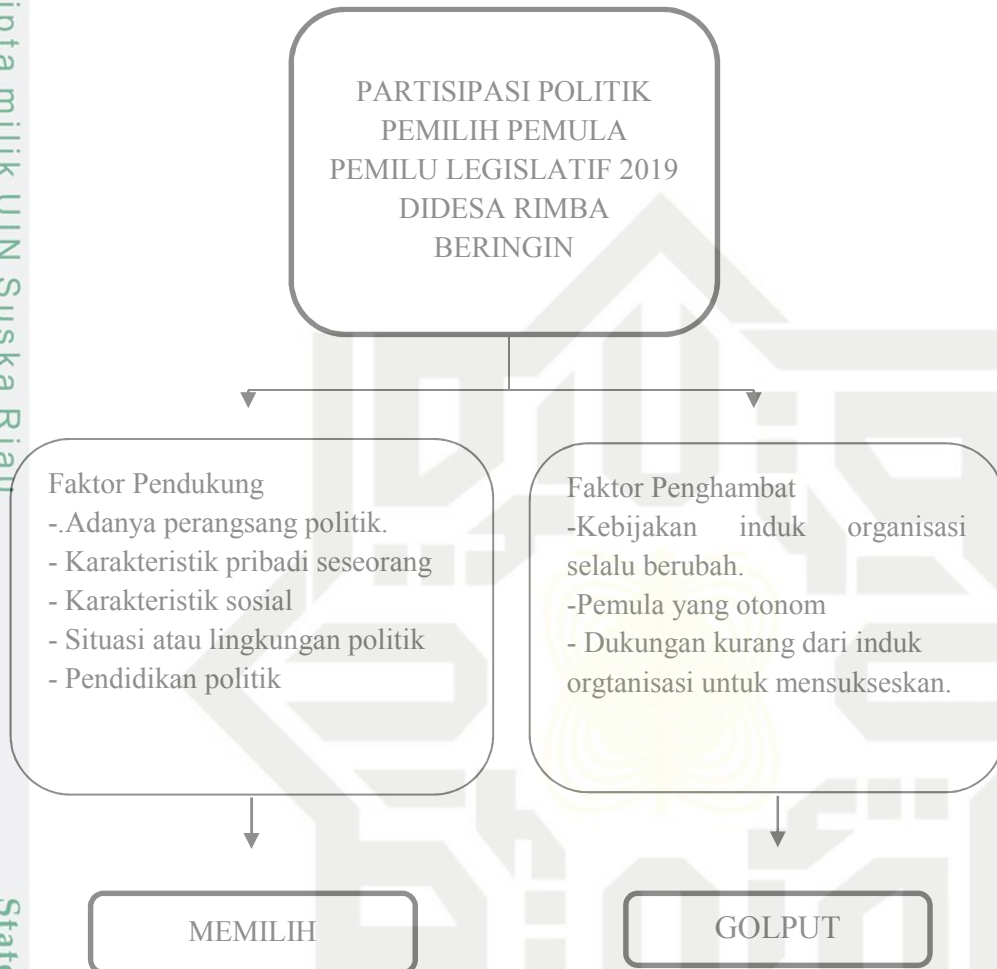
UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**GAMBARAN 2.1.1
KERANGKA PEMIKIRAN**



2.13. Indikator Penelitian

Untuk melihat gambaran yang jelas tentang variabel, indikator dari sub judul indikator konsep operasional dalam penelitian ini adalah:

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Partisipasi politik pemilih (pemilih pemula) pada pemilihan umum legislatif Tahun 2019.	Faktor pendukung	1.Adanya perangsang politik. 2.Karakteristik pribadi seseorang 3.Karakteristik sosial 4.Situasi atau lingkungan politik 5.Pendidikan politik

Faktor penghambat	1. Kebijakan induk organisasi selalu berubah. 2. Pemula yang otonom 3. Dukungan kurang dari induk organisasi untuk mensukseskan.
-------------------	--

Sumber: Milbrath dalam Maran (2007:156)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Adapun data deskriptif yang dimaksud adalah ucapan atau tulisan yang dapat diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri) dalam penelitian kualitatif tidak ditemukan adanya angka-angka yang dianalisis menggunakan alat statistik, merupakan data yang diperoleh dari penelitian deskriptif. Deskriptif digunakan untuk mengungkapkan sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika disiplin keilmuan penulis yakni ilmu politik.

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar pada bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan selesai, alasan penelitian ini dilakukan di Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar adalah berangkat dari pertimbangan kebutuhan data dan peneliti mengetahui kondisi yang terjadi di tempat yang diteliti dan melihat tingkat partisipasi milenial yang ada, serta antusias pemilih pemula (milenial) juga tinggi dalam memberikan suaranya pada pemilu, akan tetapi banyak dari pemilih pemula (milenial) yang mengenyam pendidikan, pekerja muda yang tidak mengetahui bagaimana menggunakan suara sebaik mungkin untuk memberikan hak suaranya. Jadi sesuai dengan judul analisis partisipasi Milenial (pemilih pemula) dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.



2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi, fenomenologi adalah fenomena yang berkaitan langsung dan dilakukan oleh peneliti yang digambarkan fakta.

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui study lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam melaksanakan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan para informan dan menggunakan beberapa alat untuk membantu dalam penelitian diantaranya adalah alat tulis dan alat dokumentasi serta alat perekam. Adapun masyarakat yang akan diwawancarai adalah kaum milenial (pemilih pemula) di Desa Rimba Beringin.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari study perpustakaan yang berupa buku, dokumen, jurnal, hasil penelitian yang terkait dengan study. Adapun beberapa buku yang dibaca oleh penulis adalah buku-buku ataupun hasil penelitian tentang perilaku pemilih, buku tentang perilaku pemilih pemula (milenial) serta literature maupun informasi tertulis yang berkenaan dengan study perilaku politik pemilih pemula.

3.3 Target Responden

Responden adalah istilah yang sering digunakan ilmu sosial dalam survey, individu diminta menjawab pertanyaan terstruktur. Biasanya responden menyampaikan kepada peneliti jawaban sesuai dengan pertanyaan, tidak kurang dan tidak lebih, dalam penelitian partisipan sering merujuk pada responden, dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responden menyampaikan informasi tentang diri mereka dengan menjawab wawancara atau kuesioner, dalam penelitian ini ada 81 target responden untuk meminta keterangan.

4 Informan Penelitian

Adapun infoman-informan yang telah diwawancara yakni seperti pada tabel berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Ketua KPPS	1
Jumlah		2

Sumber : Data Olahan Tahun 2019

Adapun yang menjadi informan inti dari partisipasi pemilihan umum legislatif ialah milenial dari umum 17 sampai 21 tahun di desa Rimba Beringin. Yaitu berjumlah 13 orang, yakni terdiri dari pelajar 8 orang wiraswasta 2 orang ibu rumah tangga 2 orang dan wira usaha 1 orang. Berikut ini adalah informan dari kaum milenial di Desa Rimba Beringin:

No	Keterangan	Jumlah
1	Dusun Suka Damai	4
2	Dusun Suka Harj	2
3	Dusun Suka Makmur	3
4	Dusun Suka Mulya	4
Total		13

Sumber : Data Olahan Tahun 2019

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan ini, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah : Teknik pengumpulan data primer diperoleh dari :

1. Observasi

pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencatat kedalam catatan penelitian.

2. Dokumentasi

selain itu juga untuk memperdalam studi penelitian akan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen hasil pemilu di Desa Rimba Beringin 2019, serta membaca literature yang terkait dengan study. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil, atau hukum-hukum dan nilai-nilai yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Wawancara

Pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden yang telah disusun tertulis. Pengumpulan data sekunder yaitu pengumpulan data yang diperoleh berdasarkan laporan-laporan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar serta terjun kewilayah Desa mengadakan studi kepustakaan terhadap sejumlah literatur yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

4. Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

Uma sekaran (1992) mengemukakan beberapa pendapat prinsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penulisan angket yaitu: A) isi dan tujuan pertanyaan. B) Bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. C) tipe dan bentuk pertanyaan. D) pertanyaan tidak mendua sehingga mempermudah responden untuk memberikan jawaban. E) tidak menanyakan yang sudah lupa. F) pertanyaan nya tidak mengiringi kearah yang baik saja atau yang buruk saja. G) pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak terlalu panjang, sehingga akan membuat jenuh responden dalam mengisi jawaban. H) urutan pertanyaan dimulai dari yang umum menuju yang khusus. I) angket yang diberikan kepada responden merupakan instrument penelitian yang digunakan untuk mengatur variabel yang akan diteliti. J) penampilan fisik angket akan mempengaruhi responden atau keseriusan responden dalam mengisi angket.

Pada tahap ini peneliti menyusun beberapa pertanyaan mengenai partisipasi milenial didesa rimba beringin terhadap pemilu legislatif, yang mana angket tersebut disusun berdasarkan sub indicator penelitian yang telah peneliti tulis pada BAB II dalam teori Milbrath dalam Maran (2007:156). Dalam penyusunan angket ini penulis menggunakan teori ridwan (2002:12-15) skala likert dengan rentan 5 skala yang berdasarkan alternatif jawaban sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

3.6 Analisa data

Menurut Miles dan Huberman dalam tulisan nya sugiyono (2013: 334-335) ada tiga macam kegiatan dalam analisis kualitatif, yaitu:



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyerderhanaan, abstraksi, dan pentranformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.

2. Model Data

Langkah kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Kita mendefinisikan “model” sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan. Dan permulaan pengumpulan data peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi.

Untuk menguji kebenaran penelitian secara empiris, penelitian menggunakan data kualitatif, sehingga bisa menjelaskan hukum kausalitas atau sebab akibat yang mempengaruhi faktor-faktor partisipasi politik masyarakat dan kecenderungan bentuk atau tipologi pemilih masyarakat. Analisa data secara empiris dan akhiri penarikan kesimpulan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Desa Rimba Beringin

Desa Rimba Beringin adalah nama salah satu desa diwilayah Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Rimba Beringin dikenal karena keberadaan mata berbentuk sumur diwilayah tersebut, yang konon sumur tersebut tidak pernah kering walaupun musim kemarau, dan diyakini sumur tersebut terhubung dengan sungai-sungai kecil dibawah tanah yang pada musim hujan dapat dengan cepat meresapkan air hujan yang menggenangi wajah tersebut. Wilayah tersebut lambat laun menjadi nama sebuah desa yang pada saat sekarang ini bernama Desa Rimba Beringin.

Desa Rimba Beringin mulai terbentuk mulai pada tahun 1985-2018 melalui program pemerintah transmigrasi dari berbagai daerah di Jawa yang pada masa itu berjumlah 500 KK dan dipilih oleh seorang kepala unit (KUPT) dari departemen sosial yang bernama Syamurizal pada tahun 1986 pengelolaan Desa diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi Riau dan selanjutnya dilakukan pemilihan kepala desa yang pertama yang terpilih bapak Suyoto RS. Tanah yang digunakan untuk lokasi Desa Rimba Beringin berasal dari penyerahan Ex Transmigrasi. Pada masa pemerintahan kepala desa pertama ini kegiatan desa rimba beringin banyak digunakan untuk menata kelembagaan kelompok masyarakat tersebut walaupun masih bersifat sederhana. Mulai dari pembagian lahan yang nantinya berkembang menjadi dusun dan penataan kelompok-kelompok

pertanian yang lainnya, pada saat itu kegiatan kelompok masyarakat ini banyak bekerja pada sector pertanian dan pada kelompok kecil perkebunan, namun. Karena para pendatang waktu itu berasal dari desa maka banyak juga yang membawa hewan ternak dan sebagian mengembangkannya didesa Rimba Beringin.

Letak Geografis

Desa Rimba Beringin merupakan salah satu desa dari 13 desa yang berada di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Luas wilayah Desa Rimba Beringin sebesar $\pm 1.898,5 \text{ m}^2$. Desa Rimba Beringin terdiri dari 4 kades (padukuhan). 12 RW, dan 31 RT. Desa Rimba Beringin terletak disebelah utara ibukota Kabupaten Kampar dengan jarak $\pm 50,1 \text{ km}$.

Secara administrasi Desa Rimba Beringin berbatasan dengan Desa yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jalan Negara;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kusau Makmur;
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Petapahan Jaya;
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukaramai dan Kusau makmur

Tabel 4.1 Orbitasi Waktu Tempuh

Orbitasi	
Jarak ke ibu kota kecamatan (km)	25.3 Km
a. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor (Jam)	46 Menit
b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam)	5 Jam 7 menit
c. Jumlah Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan (Unit)	-
Jarak ke ibu kota kabupaten/ kota (km)	50,1 Km
a. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor (Jam)	1 Jam 3 menit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orbitasi	
b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam)	9 Jam 54 menit
c. Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/ kota (Unit)	- Unit
a. Jarak ke ibu kota provinsi (km)	85 Km
a. Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor (Jam)	2 Jam 30 menit
b. Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam)	25 Jam
c. Kendaraan umum ke ibu kota provinsi (Unit)	- Unit

Sumber : Kantor Kepala Desa Rimba Beringin Tahun 2019

4.3. Keadaan Demografis Desa Rimba Beringin.

Masyarakat Desa Rimba Beringin adalah masyarakat yang heterogen dimana dihuni banyak suku yakni aceh, jawa, batak, minang, akan tetapi pada umumnya adalah orang jawa. Suku jawa adalah suku yang paling dominan didaerah tersebut dan yang memiliki sifat keterbukaan dan menerima baik suku lainnya dalam kehidupan sehari-hari berdampingan dan berjalan dengan baik.

Berdasarkan data statistic pada kantor Desa Rimba Beringin Jumlah penduduk sebanyak 5.569 jiwa, dan dibawah ini akan dijelaskan jumlah penduduk per jenis kelamin yang ada di Desa Rimba Beringin. Berikut ini adalah tentang jumlah penduduk Desa Rimba Beringin menurut jenis kelamin.

Tabel 4.2 Klasifikasi Jumlah Penduduk Desa Rimba Beringin Menurut Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	2.905	52.00%
2	Perempuan	2.664	48.00%
	Jumlah	5.569	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Rimba Beringin Tahun 2019

Dari tabel tersebut menunjukan bahwa keadaan penduduk Desa Rimba Beringin dari jeni kelamin laki-laki 2.905 orang atau 52.00 % sedangkan dari jenis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelamin perempuan 2.664 orang atau 48.00 % dan dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penduduk yang paling banyak adalah dari jenis kelamin laki-laki.

Mata Pencarian

Desa Rimba Beringin merupakan daerah yang mempunyai jarak lebih kurang 25.3 Km dari ibu kota kecamatan dan mempunyai aliran sungai tapung akan tetapi daerah ini berada di daratan tinggi sehingga tanah nya subur dan terhindar dari banjir.

Maka dengan kesuburan tanah tersebut masyarakat dan pegawai menggarap tanah dengan menanam tanaman atau kebun, baik itu perkebunan sayur-sayuran, karet, kelapa sawit, dan sebagainya sehingga perekonomian penduduk Desa Rimba Beringin pada umumnya sebagai petani, untuk lebih jelasnya tentang mata pencarian umumnya masyarakat tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3. Mata Pencarian penduduk Desa Rimba Beringin

JENIS PEKERJAAN	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Petani	670	137
2. Buruh tani	126	56
3. Buruh migrant perempuan	-	
4. Buruh migrant laki-laki	-	
5. Pegawai Negeri Sipil	7	10
6. Pengrajin industri rumah tangga	8	21
7. Pedagang keliling	7	3
8. Peternak	210	-
9. Dokter swasta	-	-
10. Bidan swasta	1	6
11. Pensiunan TNI/POLRI	-	
Jumlah	1,029	233

Jumlah Total Penduduk	1262
------------------------------	------

Sumber : Kantor Kepala Desa Rimba Beringin Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Rimba Beringin adalah bermata pencarian petani yaitu sebanyak 807 orang. Sedangkan mata pencarian yang sedikit yaitu Bidan swasta sebanyak 7 orang dan lain-lain sebanyak 448 orang.

4.5. Pendidikan

Perkembangan pendidikan jika dilihat dari perkembangan nya penduduk Desa Rimba Beringin menunjukkan bahwa masyarakat telah mampu dan telah menikmati pendidikan hingga keperguruan tinggi. Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Rimba Beringin yaitu:

Tabel 4.4. Jenis Sarana Pendidikan di Desa Rimba Beringin

NO	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Taman kanak-kanak (TK)	1 Unit
2	Sekolah Dasar (SDN 007 RIMBA BERINGIN)	1 Unit
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP N 2 TAPUNG HULU)	1 Unit
4	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK N 1 TAPUNG HULU)	1 Unit
Jumlah		4 Unit

Sumber : Kantor Kepala Desa Rimba Beringin Tahun 2019

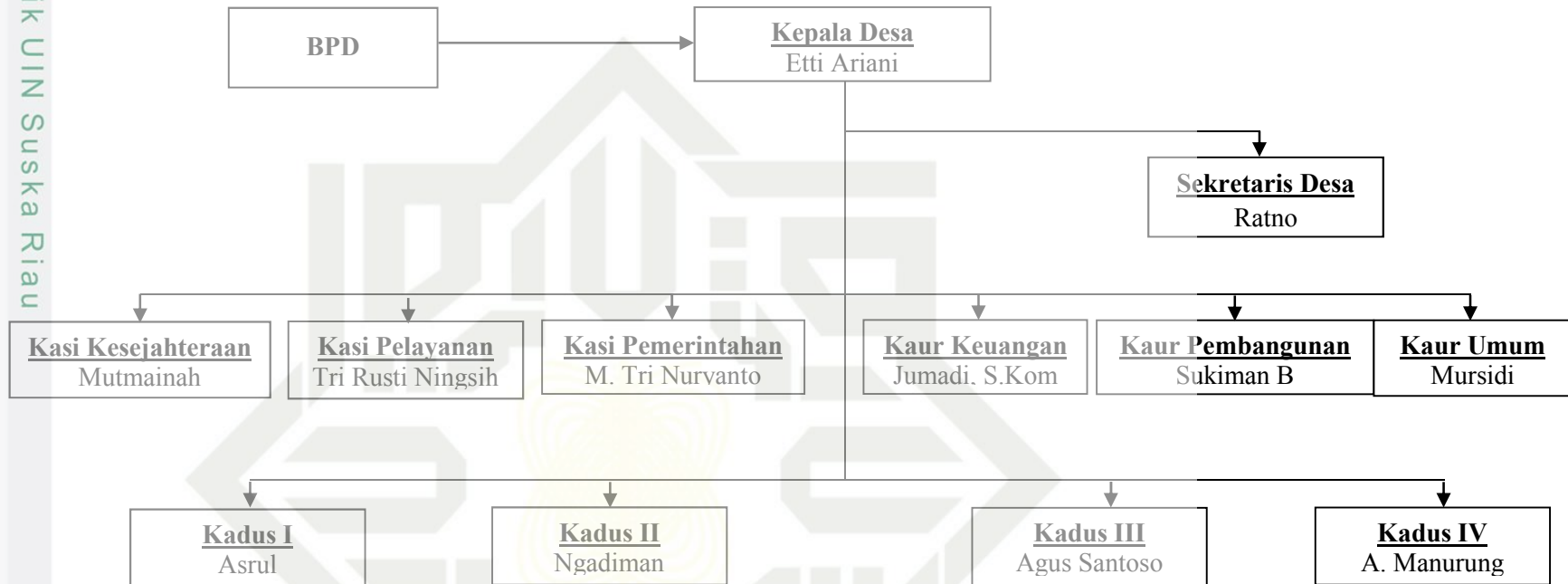
Dari data diatas dapat diketahui bahwasannya pendidikan yang ada di Desa Rimba Beringin cukup untuk memenuhi program pemerintah yaitu taman kanak-kanak 1 unit, sekolah dasar 1 unit, sekolah menengah pertama 1 unit, dan sekolah menengah kejuruan 1 unit. Berdasarkan data tabel diatas jumlah sarana pendidikan yang ada bisa untuk memenuhi pendidikan wajib belajar 12 tahun di Desa.



4.6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rimba Beringin

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat pada gambar bagan struktur organisasi dibawah;

Gambar 4.1. gambar bagan struktur organisasi Desa Rimba Beringin



Sumber : Kantor Kepala Desa Rimba Beringin Tahun 2019

Uraian Tugas

Adapun uraian tugas-tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan pada struktur organisasi diatas diatur dalam peraturan daerah kabupaten Kampar tentang struktur organisasi pemerintahan Kampar;

1. Kepala Desa

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 kepala desa adalah pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa. Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa.

2. Badan Pemerintahan Desa (BPD)

Badan Pemerintahan Desa adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis berdasarkan kewilayahan. Fungsi dari BPD adalah membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat dan mengawasi kinerja kepala desa.

3. Sekretaris Desa

Sekretari desa adalah perangkat yang membantu kepala desa menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris desa meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu mempersiapkan penyusunan peraturan desa dan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain diberikan kepala desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelaksana Urusan Desa

- a. Kepala Urusan Pemerintah (KAUR KEUANGAN)

Berfungsi untuk membantu sekretaris desa mengelolah sumber pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APB desa dan laporan keuangan desa. Serta melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.

- b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomis desa serta mengelolah administrasi pembangunan, menyiapkan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelolah tugas pembantuan.

- c. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Fungsinya untuk membantu sekretaris dalam mengelolah arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum, dan juga sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor,serta pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

5. Pelaksana Teknis.

- a. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis
- b. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional
- c. Kepala seksi mempunyai fungsi:

- 1) Kepala Seksi Pemerintahan (KASI PEMERINTAHAN)

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelolah administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertahanan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

2) Kepala Seksi Pelayanan (KASI PELAYANAN)

Memiliki tugas melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

3) Kepala Seksi Kesejahteraan (KASI KESEJAHTERAAN)

Mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

d. Kepala Dusun

Kepala dusun atau kadus bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah direkapitulasi dari jawaban responden mengenai partisipasi milenial dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

Adapun simpulan dari hasil penelitian analisis Partisipasi Milenial (Pemilih Pemula) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi pada milenial yang berada di Desa Rimba Beringin kecenderungan jawaban responden sebagian besar pada kategori yang positif kabaikan, karena kaum milenial yang berada di rimba beringin tingkat kesadaran akan berpartisipasi baik diangka 70 persen.
2. Berdasarkan hasil dari kuesioner menunjukan bahwa Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi milenial di Desa Rimba Beringin yang meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat diantaranya :
 1. Tingkat perangsang politik, dalam partisipasi milenial menunjukan bahwasanya pengetahuan tentang kesadaran partisipasi dan informasi pemilu.
 2. Tingkat karakteristik pribadi, dalam tingkat karakteristik pribadi hanya dirinya yang dapat menentukan pilhan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tingkat karakteristik sosial, pada karakteristik ini teman sepermainan maupun keluarga sangat berpengaruh.
4. Tingkat situasi atau lingkungan politik, dalam hal ini situasi atau lingkungan politik yang kondusif merupakan salah satu faktor yang mendorong untuk kaum milenial.
5. Tingkat pendidikan politik, pendidikan politik sangat lah penting bagi milenial khususnya, karena kaum milenial merupakan generasi penerus bangsa yang harus sadar akan penting nya menggunakan hak suara.
6. Tingkat kebijakan induk organisasi selalu berubah, dari kuesioner yang disebar peneliti mendapatkan hasil pada tingkat ini kaum milenial yang berada di desa rimba berigin tidak setuju dengan kebijakan yang berubah-ubah membuat mereka tidak menggunakan hak pilihnya.
7. Pemula yang otonom, acuh tak acuh dalam berpendapat karena informasi yang membuat mereka bimbang.
8. Tingkat kurang dukungan dari induk organisasi untuk mensukseskan, ketika kurang nya dukungan maka milenial akan minder untuk menyuarakan hak pilihnya, pada data yang didapat oleh peneliti mereka tidak setuju apabila pernyataan tentang tidak adanya tim sukses dalam pemilu tersebut.

6.4.3 Saran

Setelah penulis meneliti partisipasi milenial dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar peneliti memberi saran sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. milenial (pemilih pemula) hendaknya lebih membuka dirinya untuk dapat menunjukkan kemampuan nya dalam dunia politik, serta menjauhkan diri dari perasaan tidak mampu atau minder.
2. Dukungan dari keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta yang berpengaruh melalui pendidikan politik secara keseluruhan pada milenial dapat meningkatkan kualitas peran pemilih pemula pada dunia politik, akan tetapi jangan terlalu banyak yang mempengaruhi nya dalam menentukan pilihan karena hanya membuat kebingungan yang berakibat golput.
3. Pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung kegiatan milenial dalam dunia politik, serta pembinaan yang ditujukan khusus untuk pemilih pemula sehingga dapat merangsang keinginan pemilih untuk berpartisipasi dalam dunia politik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 49-50
- Mariam budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, jakarta: PT Gramedia pustaka utama.
- Sudijono Sastroatmodjo, 1995, *Perilaku Politik*, semarang: Ikip semarang Press.
- Mohammad najib dalam Suparman Marzuki, dkk, 2005. pengantar ix dalam *Asas asas pemilu*.
- Mas'ood Mochtar dan colin Man Andrew. 2008. *Perbandingan Sistem Politik* Yogyakarta: Gajah mada University press.
- Kusnardi moh.dan harmaily Ibrahim 1994. *Pengantar hukum tata Negara Indonesia*. Jakarta: sinar bakti
- Hungtington, Samuel P. dan juan M. Nelson 1994, *Partisipasi Politik Dinegara Berkembang*. Jakarta: Rineka cipta.
- Rahman H, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Young, S,J.et.al. (2013). Generational differences and job satisfaction in Leisure Services. *Manangin Leisure*,18(2) 2013,152-170.
- Prihatmoko, Joko J, 2005 Pemilihan Kepala Daerah Langsung: *Filosofi sistem dan problema penerapan di Indonesia*, pustaka pelajar, Yogyakarta
- Sugiono,2007, faktor yang mempengaruhi pemilih dalam pemilihan kepala daerah langsung : perspektif political marketing, majalah ushawan, no.5 th2004, mei 2005. Jakarta
- Sinar bakti,ramlan. 2010. *Memahami ilmu politik*.2010. Jakarta:PT Grasindo
- Suharno.2004. *diktat kuliah sosiologi politik*. Yogyakarta
- Polisin, dkk.2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press
- Syafie, Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung
- Komis Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019. *Pedoman pendidikan pemilih*. Jakarta.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini dilindungi undang-undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Perundangan :

- Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang partisipasi
- UUDS 1945 Bab 1 pasal 1 ayat 2 tentang pemilihan umum
- UU No 22 Tahun 2007 Tentang penyelenggaraan pemilu.
- UU No 32 Tahun 2004 tentang kepala daerah
- UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilih pemula

Sumber Lainnya (Jurnal dan penelitian terdahulu)

- Rezeky Saputra.2017. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014, Jom fisip. Vol.4 No 1. Hal 1-11*
- Nurkinan, Drs.M.M. 2018 *Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif dan pilpres Tahun 2019. Jurnal politikom Indonesiana Vol. 3 No. 1 Hal.26-40*
- Christiany Juditha. 2018. Penggunaan Media Digital dan Partisipasi Politi
- Generasi Milenial. Jurnal: penelitian komunikasi dan opim public.vol 22. No 2. Hal 91-105
- H.Basuki Rachmat dan Esthet. 2016 Perilaku Pemilih Pemula dalam Pilkada Serentak Di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015. Junal Ilmu Pemerintahan Widyapraja. Vol XLII. No 2. Hal 25-35

UIN SUSKA RIAU

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarung mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUESIONER PENELITIAN

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Dengan Hormat

Ketada Bapak/Ibu dan Saudara/i,

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang sedang saya lakukan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU Jurusan Administrasi Negara, maka saya melakukan penelitian dengan judul: "ANALISIS PARTISIPASI MILENIAL (PEMILIH PEMULA) DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI DESA RIMBA BERINGIN, KECAMATAN TAPUNG HULU, KABUPATEN KAMPAR"

Adapun salah satu cara untuk mendapatkan data adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Untuk itu, saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu dan Saudara/i sekalian untuk mengisi kuesioner ini sebagai data yang akan dipergunakan dalam penelitian dan di jamin kerahasiaannya. Atas kesediaan dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Peneliti,

(Ilham Guma Rasti Wijaya)

Petunjuk pengisian

- a. Kuesioner ini semata-mata untuk keperluan akademis, mohon di jawab dengan jujur.
- b. Bacalah semua pernyataan dengan teliti tanpa ada yang terlewatkan.
- c. Berilah tanda (\checkmark) pada jawaban yang menurut anda tepat.

Keterangan: SS (Sangat Setuju)

S (Setuju)

CS (Cukup Setuju)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TS (Tidak Setuju)

STS (Sangat Tidak Setuju)

Data Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
3. Umur : Tahun
4. Pekerjaan :

BAGIAN I

PERNYATAAN RESPONDEN

No	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS
		1	2	3	4	5
Perangsang Politik						
1	Saya berpartisipasi dalam pemilu legislatif tahun 2019					
2	Saya memperoleh informasi perkembangan politik melalui media masa.					
3	Kemajuan teknologi informasi mempengaruhi saya dalam berpartisipasi politik					
4	Saya mengikuti kegiatan kampanye yang diselenggarakan partai politik					
Karakteristik Pribadi						
1	Saya menggunakan hak pilih dalam pemilu legislatif tahun 2019 dengan suka rela					
2	Saya menggunakan hak pilih karena kesadaran sebagai warga negara					
Karakteristik Sosial						
1	Saya menggunakan hak pilih berdasarkan pengaruh teman					
2	Saya menggunakan hak pilih karena mendapatkan sejumlah materi (uang)					
3	Saya menggunakan hak pilih berdasarkan permintaan tokoh masyarakat					
Situasi Atau Lingkungan Politik						



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarar mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarar mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	Saya mengikuti sosialisasi politik yang diselenggarakan oleh partai politik dalam pemilu legislatif					
2	Lingkungan saya berpengaruh dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu legislatif					
	Pendidikan Politik					
1	Kebijakan pemerintah mempengaruhi saya dalam menggunakan hak pilih					
2	Pemerintah sudah baik dalam melakukan sosialisasi untuk kesadaran berpartisipasi politik					
	Kebijakan Induk Organisasi Selalu Berubah					
1	Kebijakan pemerintah yang selalu berubah menyebabkan saya tidak menggunakan hak pilih					
	Pemula Yang Otonom					
1	Saya tidak ingin menggunakan hak pilih dalam pemilu legislatif					
2	Saya tidak terpengaruh untuk memilih calon berdasarkan teman, saudara maupun orang tua.					
	Dukungan Kurang Dari Induk Organisasi Untuk Mensukseskan					
1	Tidak adanya tim sukses dalam menyelenggarakan sosialisasi					

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id. E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Un.04/F.VII/PP.00.9/7340/2019
: Biasa
: -
: Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 4 Desember 2019 M
7 Rabiul Akhir 1441 H

Kepada
Yth. **Mashuri, MA**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a	: Ilham Guma Rasti Wijaya
NIM	: 11675101425
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Partisipasi Milenial (Pemilih Pemula) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/1122

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RI/778768 tanggal 13 Desember 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama
2. NIM
3. Universitas
4. Program Studi
5. Jenjang
6. Alamat
7. Judul Penelitian

: **ILHAM GUMA RASTI WIJAYA**
: 11675101425
: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
: ADMINISTRASI NEGARA
: S1
: PEKANBARU
: **ANALISIS PARTISIPASI MILENIAL (PEMILIH PEMULA) DALAM
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI DESA RIMBA BERINGIN
KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR**
: KANTOR DESA RIMBA BERINGIN, KECAMATAN TAPUNG
HULU, KABUPATEN KAMPAR

8. Lokasi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terimakasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 20 Desember 2019

an. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kasi. Kesatuan Bangsa



NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Kantor Desa Rimba Beringin di Tapung Hulu.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

KANTOR KEPALA DESA RIMBA BERINGIN

KECAMATAN TAPUNG HULU

Alamat : Jl. POROS DESA RIMBA BERINGIN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 471.01/RB-TPHU/IV/2020/024

Dengan bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ETTI ARIANI**
Jabatan : **KEPALA DESA RIMBA BERINGIN**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ILHAM GUMA RASTI WIJAYA**
Nim : **11675101425**
Fakultas : **EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU**
Jurusan : **ADMINISTRASI NEGARA**
Jenjang : **S1**
Alamat : **Pekanbaru**
Judul Penelitian : **ANALISIS PARTISIPASI MILENIAL (PEMILIH PEMULA) DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI DESA RIMBA BERINGIN KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR.**

Telah melakukan Pendataan/Riset pada Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar untuk mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam penelitian dengan judul tersebut diatas.

Demikianlah surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : **RIMBA BERINGIN**
PADA TANGGAL : **13 April 2020**

KEPALA DESA RIMBA BERINGIN

ETTI ARIANI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



ILHAM GUMA RASTI WIJAYA, Lahir pada tanggal 28 April 1998 di Desa Rimba Beringin. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan ayahanda Rudi Wijaya dan Ibunda Istiqomah. Penulis memulai Pendidikan formalnya di TK Iqra Medan, SDN 014 Bukit Kemuning, kemudian dilanjutkan ke SMP 2 Tapung Hulu. Serta penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 3 Tapung. Pada Tahun 2016 Penulis melanjutkan studi program strata-I pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada saat duduk di bangku kuliah penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor KPU Kota Pekanbaru, Selanjutnya Penulis juga mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak. Penulis dinyatakan lulus pada tanggal 16 Juni 2020 dengan judul skripsi “**Analisis Partisipasi Milenial (Pemilih Pemula) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar**”